



Laporan Studi Lapangan :



Hambatan Sosio-Kultural Dalam Menuju Masyarakat Informasi

Oleh : Tim Redaksi

A. Pendahuluan

Isu masyarakat informasi di Indonesia sebenarnya sudah santer menjadi wacana sejak dekade 1990-an, yang mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Di kalangan komunitas akademik, seminar dan diskusi yang mengambil topik masyarakat informasi sering dilakukan. Tidak kurang dari ratusan tulisan ilmiah telah diterbitkan dalam berbagai jurnal yang mencoba mengupas topik ini dari berbagai perspektif. Terdapat *pro dan kontra*, terutama jika dikaitkan dengan upaya penerapannya di Indonesia.

Sementara itu pemerintah pun dengan cepat merespons perkembangan baru tersebut dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan dalam memasuki era masyarakat informasi. Segegap infrastruktur dan kelembagaan



telah dibangun guna menyongsong era yang gegap-gempita itu. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam rencana strateginya mencantumkan globalisasi menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antarnegara dan wilayah. Oleh karena itu terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based society*). Menyadari kecenderungan itu, maka Indonesia sepakat menjalin kerjasama antarnegara menuju masyarakat berbasis informasi seperti dirumuskan *World Summit on the Information Society* di Geneva tahun 2003.

Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan standar masyarakat informasi dengan indikator meliputi: (1) akses komunikasi terhubung di 50% Kota/Kabupaten; (2) tersedianya layanan *Broadband Wireless Access* (BWA), di kota besar; (3) layanan pemerintah kepada masyarakat bersifat transparan; (4) sebagian besar perguruan tinggi dan SMA/SMK terhubung internet dan literasi teknologi informasi, dan SDM yang memiliki *e-skills* meningkat; (5) semua penduduk tercatat dengan data yang *unique*; (6) keamanan dan transaksi elektronik terjamin; (7) jumlah pembajakan berkurang hingga 60%, sehingga citra positif Indonesia di mata internasional meningkat; dan (8) pengguna internet meningkat menjadi 50 juta. (*e-Indonesia, Vol.II/No.17 Edisi 15 Januari-14 Februari 2007*).

Sementara itu, dalam kajian akademik, juga terdapat upaya memahami konsep masyarakat informasi yang berangkat dari asumsi-asumsi linieristik dalam perkembangan ekonomi dan perubahan sosial. Pada awalnya dasar ekonomi masyarakat berbasis pada aktivitas pertanian (*agricultural economy*), dan kemudian pada awal abad 19 berubah dengan basis utama perindustrian (*industrial economy*). Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi lagi perubahan masyarakat menjadi berbasis pada pelayanan (*service economy*), dan mulai dekade 1980-an, masyarakat berkembang dengan basis ekonomi informasi (*information economy*), terutama terjadi di negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, dan beberapa negara Asia Pasific.

Dalam ekonomi berbasis informasi, usaha yang terkait dengan sektor informasi berperan besar menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Usaha yang dimaksud adalah usaha yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pusat data/informasi, hiburan, kesenian, barang-barang yang terkait seperti

komputer, buku, kertas, dan beberapa pelayanan yang sangat bergantung pada pengolahan informasi, seperti kedokteran akuntansi, dan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Fritz Machlup dan Marc Porat bahwa pada dekade 1970-an saja sektor informasi menyumbangkan lebih dari seperempat GNP Amerika Serikat.

Industri tradisional pun harus menyesuaikan diri dengan kecenderungan ekonomi baru itu yang mengandalkan aspek informasi dan pengetahuan jika ingin tetap eksis. Ketika industri sudah sedemikian mapan, maka satu-satunya jalan untuk tetap bertahan adalah mengolah informasi sedemikian rupa untuk mencari cara baru guna menarik pembeli. Alhasil, yang sebenarnya dijual oleh pabrik sepatu Nike misalnya, bukanlah sepatu itu sendiri (karena sepatu dengan kualitas yang sama tapi dengan merek lain harganya bisa jauh lebih murah), melainkan kepuasan emosional pembeli (merasa bergensi, modis, dll) demi pencitraan diri. Desain produk yang memberi kepuasan emosional demi citra diri didapat dari hasil riset pengolahan informasi (Stapleton, 2001). Inilah kecenderungan yang terjadi, dengan berkembangnya ICT yang menjadi basis ekonomi, mengarah pada pergeseran moda produksi yang lebih mengandalkan pengolahan informasi, yang sekarang disebut sebagai ekonomi kreatif.

Sementara itu Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave*, menjelaskan perkembangan masyarakat dalam kurun waktu 10.000 tahun menggolongkan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama, terbentuknya masyarakat pertanian, gelombang kedua terbentuknya masyarakat industri, dan gelombang ketiga apa yang ia sebut sebagai terbentuknya masyarakat informasi. Dalam kasus yang lain, membumbung tingginya biaya produksi dan faktor keterbatasan sumber daya, telah memaksa masyarakat industri untuk terus melakukan pelbagai penelitian dan penemuan dengan menggunakan pelbagai teknologi tinggi. Batu bara, rel kereta api, tekstile, baja, mobil, karet, alat-alat dan mesin pabrik pada akhirnya bisa digolongkan sebagai industri klasik dalam era industri.

Teknologi yang tinggi telah meyakinkan manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan utamanya, ataupun menyelesaikan pekerjaan utamanya dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mempunyai sisa waktu yang lebih banyak untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan lainnya, seperti misalnya: rekreasi, seni dan budaya, pendidikan, pengobatan, R

& D, dalam bidang *biotech-engineering*. Yang terakhir ini disebut sebagai *third manufacturing* yang bertitik berat pada bidang pelayanan. Hal ini tercermin dalam struktur kependudukan di negara maju, antara lain Amerika, dimana kaum petani hanya meliputi 2½ persen dari seluruh penduduk, tetapi hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pangan di berbagai penduduk negara lain di dunia. Kaum buruh ataupun kaum pekerja pabrik hanya merupakan 17% dari jumlah penduduk, sedang sisanya adalah pekerja "*white collar*" di bidang pelayanan.

Pada titik itulah kemudian perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi masalah krusial jika berkaitan dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Isu seperti kesenjangan ekonomi, *cultural shock*, dan kemudian kesenjangan digital mewarnai perdebatan dalam strategi pembangunan teknologi komunikasi dan informasi di negara berkembang. Terlebih lagi jika berkaitan dengan perkembangan masyarakat perdesaan, kompleksitas permasalahannya menjadi bertambah rumit seiring dengan keinginan kuat pengambil keputusan yang meyakini bahwa teknologi komunikasi dan informasi akan banyak membantu permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di perdesaan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, upaya menuju masyarakat informasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Terdapat berbagai kendala yang sering dijumpai di masyarakat, baik kendala struktural maupun kultural. Sikap pengabaian terhadap faktor sosial budaya, terbukti menjadi penyebab utama gagalnya transformasi dalam menuju masyarakat informasi. Sejumlah permasalahan sosio kultural terus mengemuka ketika mendiskusikan kesiapan masyarakat dalam menuju masyarakat informasi. Mulai dari apakah Indonesia benar-benar telah memenuhi prasyarat sosio-kultural sebagaimana yang dituntut oleh kriteria masyarakat informasi? Dari aspek sosial misalnya, apakah struktur sosial masyarakat kita sudah egalitarian sehingga memungkinkan setiap warga negara mempunyai peluang yang sama dalam mengakses informasi? Apakah secara kultural masyarakat kita telah mengalami transformasi baik pandangan, sikap, dan tindakan sebagaimana yang dituntut masyarakat informasi, seperti berkembangnya persepsi bahwa pengetahuan itu penting, budaya baca yang meningkat, dan sensitif terhadap data dan informasi? Sederet pertanyaan ini akan berusaha dijawab dalam studi lapangan ini, melalui

kunjungan ke berbagai daerah.

Daerah yang dikunjungi itu meliputi 6 wilayah di Indonesia untuk mendapatkan pendapat publik tentang berbagai kendala sosio kultural dalam menuju masyarakat informasi. Keenam lokasi studi lapangan tersebar di wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur yang dianggap cukup potensial menuju masyarakat informasi, yaitu meliputi Bandung, Sragen, Malang, Pontianak, Denpasar, dan Ambon. Adapun pertimbangan dipilihnya kota tersebut adalah, bahwa di samping untuk mewakili perimbangan teritorial yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah dan timur, juga atas pertimbangan potensi dan karakter sosiokultural daerah tersebut dalam menuju masyarakat informasi. Untuk daerah-daerah yang dianggap sudah cukup ada kesiapan infrastruktur diwakili oleh Bandung, Malang, dan Sragen. Sedangkan daerah yang mewakili kurang tersedianya infrastruktur adalah Pontianak dan Ambon. Sementara itu untuk mewakili keunikan budaya dan sosialnya terwakili pada daerah Denpasar.

DENPASAR

Denpasar, dan Bali pada umumnya merupakan daerah pariwisata yang berbasis pada keunikan budaya dan keindahan alam. Masyarakat Bali mempunyai beraneka ragam obyek wisata budaya dan alam yang memiliki daya tarik kuat terhadap wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik.

Kuatnya mempertahankan tradisi yang berpusat pada agama Hindu Bali, menjadikan daerah ini kaya dengan nilai-nilai kemagisan di tengah derasnya arus modernisasi. Ketika di wilayah lain ritual-ritual budaya semakin pudar akibat tidak tahan terhadap gempuran budaya global dan kapitalisme, kepercayaan dan seni tradisional di Bali masih tetap bertahan, dan bahkan menjadi faktor diterminan terhadap denyut ekonomi industri pariwisata.

Perubahan sosial-ekonomi yang digerakkan oleh arus modernisasi memang terjadi secara cukup signifikan, akan tetapi Bali tetap bisa tampil berkarakter. Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan kesejahteraan



rakyat, karena itu sektor ini juga terus memperbarui diri. Ketika teknologi informasi dan komunikasi menawarkan berbagai jasa pelayanan, maka pemerintah mengembangkan pelayanan industri pariwisata berbasis teknologi informasi. Di semua unit pemerintahan baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota telah membuat web yang memberikan layanan informasi pariwisata.

Kesadaran akan pentingnya informasi itu juga berkembang di kalangan swasta dan masyarakat pada umumnya. Hotel, biro perjalanan, industri kerajinan, dan bahkan warga Bali yang usahanya menggantungkan pada industri pariwisata telah memanfaatkan fasilitas teknologi informasi. Informasi tentang hotel lengkap dengan tawaran fasilitasnya, dengan mudah bisa diakses melalui jaringan internet. Siapa pun yang ingin berwisata di Bali, akan dengan mudah mengakses informasi tentang fasilitas pendukung, seperti obyek wisata, penginapan, sewa mobil, hingga informasi harga souvenir.

Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya informasi bagi upaya menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat, tetapi secara kultural, perilaku masyarakat Bali itu sendiri masih belum transformatif. Menurut Nyoman Subanda, seorang sosiolog dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, salah satu karakter utama yang dituntut oleh era informasi adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan. "Jika pengetahuan sudah dianggap penting, maka minat baca menjadi sangat penting. Sayangnya justru minat baca itulah yang sekarang ini kurang berkembang dalam masyarakat Bali pada umumnya", kata Subanda.

Kunjungan ke perpustakaan warga masyarakat Bali boleh dikatakan masih rendah, terlebih lagi di daerah perdesaan. Memang pemerintah Bali telah menyediakan fasilitas perpustakaan keliling, akan tetapi masih terbatas di wilayah perkotaan. Lebih dari itu, warga masyarakat desa pun belum berkembang persepsi bahwa perpustakaan adalah penting bagi menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. "Saya tidak pernah pergi ke perpustakaan, selama menjadi pedagang. Dan saya lihat teman-teman saya yang jadi petani, buruh pabrik, buruh bangunan, dan pengrajin juga tidak pernah ke perpustakaan. Ke perpustakaan itu kan kegiatannya anak sekolah," ujar Suwartana, seorang pedagang di kawasan Bedugul.

Subanda lebih lanjut menjelaskan bahwa rendahnya minat baca di Bali, di samping belum berkembangnya fasilitas bacaan, juga karena

kecenderungan budaya menonton. Sekarang ini semakin maraknya perkembangan media massa televisi, menyebabkan orang lebih suka menonton televisi. Akses informasi oleh warga masyarakat, sekarang ini lebih banyak menggunakan saluran media televisi ketimbang media cetak. Karakter informasi media televisi hanya bersifat sekilas dan pendek, sehingga informasi yang bersifat pengetahuan yang konseptualistik kurang bisa ditangkap khalayak. Lebih dari itu, budaya menonton sebagai akibat maraknya televisi sekarang ini, membuat warga masyarakat lebih suka terhadap pesan-pesan yang bersifat rekreatif ketimbang yang informatif.

Merespons atas permasalahan rendahnya minat baca itu Pemprov Bali terus berupaya memasyarakatkan pentingnya perpustakaan. Pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca perlu dilaksanakan terus menerus untuk menyatukan visi dan persepsi semua *stakeholder* perpustakaan guna membangkitkan minat baca masyarakat. Pemasyarakatan ini diharapkan dapat membentuk manusia yang cerdas dan berilmu pengetahuan guna mendukung terwujudnya visi Bali 2020. Demikian ditegaskan oleh Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali, Gde Mahardiana.

Lebih jauh, Mahardiana menekankan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan melalui layanan di bidang perpustakaan. Adapun upaya yang bisa dilaksanakan antara lain mendorong keberlangsungan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagai wadah penyedia akses informasi dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta teknologi komunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan; mengembangkan dan memfungsikan Perpustakaan Daerah Provinsi yang pada gilirannya dapat melakukan fungsi pembinaan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peran pembinaan yang dimungkinkan; mendorong tumbuhnya Perpustakaan Umum Kecamatan yang dibina langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam spirit otonomi yang bertanggung jawab, dan selanjutnya melalui fungsi perpustakaan Umum Kecamatan, akan didorong tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan Desa, Perpustakaan sekolah dan berbagai Taman Bacaan Masyarakat

sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah untuk mendorong minat baca masyarakat perdesaan.

Saat ini perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pembinaan sumber daya manusia semakin besar. Hal ini dapat dilihat dimana pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia telah menjadi salah satu prioritas pembangunan Provinsi Bali. "Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini tidak hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah semata akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat dan lembaga pendidikan yang ada di Bali. Untuk itu berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki, terutama terhadap Perpustakaan di Sekolah-sekolah, perpustakaan milik Pemerintah maupun swasta dan Taman Bacaan Masyarakat hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal", ungkap Mahardiana.

Sementara itu, Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan, Nyoman Andari, menyampaikan bahwa membaca merupakan kunci keberhasilan masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan merupakan unsur terpenting dalam pendidikan baik bersifat formal maupun non formal. Minat baca pada masyarakat akan tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan membaca yang dibentuk dari lingkungan internal yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh salah seorang dosen Jurusan Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Singaraja, Dewa Kade Tastra, minat baca di kalangan mahasiswa masih kurang mengembirakan. Mobilitas mahasiswa dalam mencari sumber-sumber belajar masih tergolong rendah, terbukti bahwa mahasiswa kurang memiliki minat tinggi dalam mengunjungi sumber-sumber belajar, seperti perpustakaan, toko buku, museum, dan sumber belajar lainnya. Mahasiswa sekarang dalam menggunakan anggaran untuk membeli buku masih rendah, jauh di bawah dana yang disediakan untuk membeli pulsa, fashion, kosmetik, atau bahkan rokok bagi mereka yang merokok.

Selanjutnya Dewa Kade Tastra mengatakan, memang mahasiswa sekarang telah memiliki fasilitas IT yang memadai, seperti hampir setiap mahasiswa telah memiliki laptop. Akan tetapi oleh karena belum berkembang kultur membaca yang baik, maka akses informasi yang bersumber dari perangkat IT masih belum

dimanfaatkan untuk kepentingan yang produktif. Mereka cenderung masih menggunakan laptop untuk kepentingan rekreatif, seperti games, chatting, dan facebook. Mahasiswa belum secara optimal memanfaatkan jaringan internet untuk kepentingan pengembangan akademiknya, seperti Jurnal, e-book, dan mengunduh informasi konseptual lainnya. Lebih dari itu, mahasiswa, dan kalangan akademik pada umumnya, termasuk dosen, juga masih lebih banyak men-download dari meng-upload dalam memanfaatkan jaringan internet. Padahal seharusnya, jika memang mau memasuki era informasi maka kemampuan meng-upload itulah yang dipentingkan, sehingga mampu menjadi subyek atau pelaku dalam era dunia masyarakat cyber.

MALANG

Kota Malang yang sudah mendeklarasikan diri sebagai kota IT, telah melakukan berbagai terobosan untuk memanfaatkan media IT sebagai sarana yang tepat dan cepat dalam setiap aktivitas kerja, belajar, bisnis, dan komunitas bagi masyarakat di Kota Malang, baik dilingkungan pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat luas. Malang Merdeka IT tidak lain sebagai upaya untuk mencapai atau meraih "Malang Smart city" yang pada intinya akan memberikan bekal kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengenal IT secara komprehensif.

Telecenter Daragati sendiri dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dalam segala aspek kehidupan, baik bidang pendidikan, perdagangan, pertanian, keuangan dan pemerintahan yang akan memberikan dampak pada kecerdasan masyarakat dalam penguasaan informasi yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam menjalankan roda ekonomi di wilayah kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri dan kota pariwisata ini.

Kota Malang bagi masyarakat Jawa Timur telah mendapat sebutan sebagai kota pendidikan. Terdapat perguruan tinggi yang cukup besar di kota ini, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas



Muhammadiyah Malang. Kota di lereng gunung Semeru ini juga terkenal sebagai kota perkebunan sejak jaman kolonial Belanda. Buah Apel merupakan komoditas perkebunan yang populer di kota ini, terutama dari kota Batu, 25 km arah barat kota Malang.

Dalam upaya percepatan transformasi menuju masyarakat informasi, Pemkot Malang menekankan pada program pelayanan birokrasi berbasis pada IT. Perijinan usaha, proses pembuatan KTP, dan berbagai layanan publik lainnya telah berbasis IT. Jika dahulu proses perijinan usaha bisa berbulan-bulan, sekarang 1 hingga 2 minggu sudah jadi. "Semua itu merupakan komitmen Pemkot untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara cepat dan efisien, agar para investor tertarik berusaha di Kota Malang", ujar M. Jusuf, Kabag Humas Pemkot Malang.

Untuk pelayanan KTP, Pemkot telah menyediakan layanan terpadu yang cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan fasilitas IT, Pemkot telah mempunyai server yang dipakai untuk menyimpan identitas data penduduk yang senantiasa diperbarui. Data penduduk, mulai dari tingkat pendidikan, tingkat status sosial-ekonomi, dan data demografi lainnya telah tersimpan dalam server utama yang bisa diakses dengan mudah oleh siapa pun yang memerlukannya. Badan Pusat Statistik Kota Malang juga telah menerbitkan Malang dalam Angka yang bisa diakses melalui jaringan internet. "Untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi berbasis IT, Pemkot Malang juga telah melakukan studi banding ke Selandia Baru", kata Jusuf di ruang kerjanya.

Sementara itu di bidang pendidikan, Pemkot Malang telah meluncurkan program Televisi Pendidikan (TVE) yang bertujuan agar kualitas sumber daya manusia di Kota Malang semakin meningkat. Melalui TVE warga kota Malang dapat memperoleh saluran alternatif yang lebih edukatif di tengah derasnya arus siaran televisi yang menonjolkan hiburan. TVE dintegrasikan dengan program pendidikan sekolah, sehingga menambah wawasan dan pengayaan dalam informasi pendidikan. "Peluncuran TVE ini juga merupakan bagian dari upaya menyiapkan warga masyarakat Kota Malang memasuki era masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan", Kata Wali Kota Malang Peni Suparto.

Akan tetapi, sebagaimana fenomena di daerah lain, di Malang kecenderungan anak sekolah kurang memiliki etos belajar tinggi juga terasa. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi, meski harus diakui membawa pengaruh positif, tetapi juga mempunyai dampak buruk bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Semangat mencari pengetahuan mengalami penurunan akibat maraknya tawaran hiburan berbasis IT. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Mapiarie, dosen dari Universitas Negeri Malang, bahwa di Malang juga marak tempat-tempat penyewaan game-net, warnet, dan café yang menyita banyak waktu bagi kalangan pelajar. "Pelajar sekarang kurang memiliki etos belajar tinggi, salah satu sebabnya adalah menjamurnya godaan hiburan yang berbasis IT. Pelajar lebih sering memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain dan mencari hiburan dalam situs-situs internet atau di tempat-tempat penyewaan game-net", ujar Mapiarie.

Sementara itu, di kalangan masyarakat sendiri kurang berkembang budaya baca. Di tempat-tempat tunggu, seperti di stasiun, terminal, ruang tunggu dokter, tidak tampak orang membaca buku. Mereka lebih suka mengobrol atau duduk diam saja asyik dengan HP-nya. Padahal salah satu indikator masyarakat informasi adalah semakin meningkatnya apresiasi terhadap pengetahuan. Budaya baca adalah salah satu karakter utama masyarakat yang apresiatif terhadap ilmu pengetahuan. Seluruh aktivitas keseharian dalam masyarakat informasi adalah harus berbasis pengetahuan. "Kalau bicara soal masyarakat informasi, kesiapan warga Malang dilihat dari minat bacanya masih memprihatinkan. Belum terlihat kebiasaan membaca warga masyarakat yang ditunjukkan di ruang-ruang tunggu. Mereka lebih suka mengobrol daripada membaca", kata Fajar Murwantoro, aktivis LSM Kota Malang.

Fajar juga menjelaskan, warga kota Malang juga mengalami buta fungsional. Artinya, meskipun mereka memiliki fasilitas IT yang canggih, tetapi pemanfaatannya hanya untuk kepentingan komunikasi. Fitur-fitur yang dikuasai pun dalam alat komunikasi canggih itu juga masih minimal. "Semua itu bisa dikatakan sebagai indikator konsumtif. Meskipun mereka memiliki peralatan HP yang canggih, Laptop keluaran terbaru, dan Blackberry, tetapi mereka kurang memanfaatkan fungsi peralatan tersebut secara optimal.

AMBON

Industri teknologi informasi



dan komunikasi (TIK) di tanah air mencatat sejarah baru dengan dimulainya pembangunan proyek Palapa Ring. Pada 30 November 2009, atau satu bulan menjelang tutup tahun 2009 tonggak sejarah itu terukir yang ditandai dengan peresmian pembangunan awal oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Palapa Ring merupakan suatu program pemerintah membangun jaringan serat optik internasional terdiri atas 7 cincin (ring) melingkupi 33 ibukota provinsi dan 460 kabupaten 440 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Khusus di KTI, pembangunan Palapa Ring sepanjang 10.812 km yang menghubungkan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua itu merupakan impian masyarakat karena dalam waktu dekat dapat menikmati berbagai layanan telekomunikasi yang tidak terbatas pada percakapan suara, tetapi juga akan tersedia akses data internet berkecepatan tinggi. Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, apabila Indonesia berhasil membangun Ring Palapa dengan kapasitas tak terbatas, maka negara ini bisa memiliki daya tawar akses ke negara-negara Tier 1 (Amerika Serikat, dan Eropa) melalui tiga benua dan dua samudera karena memiliki jumlah pengguna internet potensial.

“Ujung cincin dari proyek ini seperti di Papua bisa menjangkau Samudera Pasifik,” kata Tifatul.

Meskipun demikian, secara umum pembangunan infrastruktur TIK di Ambon masih belum memadai. Sebagaimana dikatakan oleh Kabid Bina Media, Roy Putirulan dan Kabid Telematika Dinas Infokom Provinsi Maluku, M.T. Patipeilohy, infrastuktur TIK masih belum lengkap. Untuk tingkat Kabupaten dan Kota saja baru ada sekitar 25 persen, sehingga media yang paling diandalkan masih radio yang mampu menjangkau 80 persen wilayah Maluku. Sementara media televisi baru bisa menjangkau sekitar 60 persen wilayah Maluku, meskipun pemerintah telah membangun pemancar di daerah perbatasan dengan Filipina. Bahkan di daerah Seram Timur hingga sekarang masih sulit dijangkau oleh siaran televisi. Kondisi belum memadainya infrastruktur TIK di Maluku juga diakui oleh Pembantu Rektor IAIN Ambon, Hasbullah Toysuta. Meskipun di kota Ambon infratraktur sudah cukup memadai, tetapi untuk wilayah Maluku secara keseluruhan masih jauh tertinggal jika dibandingkan di

kawasan Indonesia Barat. Media cetak di Ambon saja, datangnya sangat terlambat, karena belum ada fasilitas cetak jarak jauh.

Akan tetapi dalam keterbatasan itu, jajaran birokrasi Pemkot Ambon tetap mengembangkan pelayanan berbasis IT. “sejauh ini pelayanan birokrasi pemerintah sudah berbasis IT, meskipun belum maksimal. Seperti layanan pajak, sistem perkantoran di Kantor Gubernur, dan pembuatan KTP sudah menggunakan fasilitas IT. Saat ini jajaran pemerintah Kota Ambon telah berupaya meningkatkan sistem pelayanan satu atap yang berbasis IT”, kata Patipeilohy. Tentang belum optimalnya pelayanan birokrasi berbasis IT ini juga diungkapkan oleh Toysuta, bahwa yang sudah dilakukan hingga sekarang ini masih baru terbatas pada pengurusan KTP dan pembayaran pajak.

Sedangkan dari aspek sosio kultural, kehadiran TIK di Ambon masih menyodorkan permasalahan, seperti masih belum tingginya minat baca warga masyarakat, dan belum berkembangnya kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai basis dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. Menurut pengungkapan dari informan, hampir semua sepakat bahwa minat baca warga Ambon dan Maluku pada umumnya masih perlu ditingkatkan. Pemerintah memang telah menyediakan fasilitas perpustakaan keliling, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal. Menurut Toysuta, belum terlihat upaya serius dari pemerintah untuk menciptakan budaya baca masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan perpustakaan. “Memang di Ambon terdapat perpustakaan keliling, tetapi tidak efektif karena masyarakat kurang berminat. Pemerintah juga belum memberikan subsidi buku, kecuali bagi sekolah-sekolah formal”, ungkap Toysuta. Hampir semua informan mengharapkan agar pemerintah mengkampanyekan secara terus-menerus untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Sementara itu aspek kultural lain yang menjadi kendala bagi percepatan transformatif menuju masyarakat informasi adalah masih belum berkembangnya kesadaran akan pentingnya pengetahuan. Kehadiran internet misalnya, warga masyarakat belum menganggap sebagai sumber pengetahuan yang berguna bagi upaya mengatasi problem kehidupan sehari-hari. Sebagai indikatornya adalah, masih banyak warga masyarakat dalam menggunakan internet hanya untuk chatting, game, dan face book yang sifatnya rekreatif. Sebagaimana diungkapkan Toysuta, mungkin karena kita masih merupakan negara



sedang berkembang sehingga pemanfaatan internet atau sarana TIK lainnya lebih pada fungsi hiburannya daripada fungsi informatifnya. Untuk itu, Toysuta menganjurkan agar pemerintah terus berupaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih mengutamakan informasi yang bersifat mencerdaskan dan memenuhi hajat hidup orang banyak.

Penilaian senada juga datang dari Pendeta J.A Manuhutu, Wakil Ketua Forum Dialog Antarumat Beragama Provinsi Maluku, bahwa memang ada kecenderungan warga masyarakat dalam memanfaatkan internet masih aspek rekreatifnya. Akan tetapi ada juga sebagian warga yang telah memanfaatkan IT untuk pengembangan usaha, terutama dari kalangan pebisnis. Oleh karena itu ia menganjurkan agar pengetahuan masyarakat tentang IT terus ditingkatkan, sehingga mampu memanfaatkan untuk kepentingan yang produktif.

PONTIANAK

Dinamika pembangunan infrastruktur TIK di Kota Pontianak terus mengalami peningkatan, terutama sejak tahun 2007, terbukti sekarang semua SKPD di Pemkot Pontianak sudah terhubung dan terkoneksi satu sama lain. Website Kota Pontianak juga sudah bisa diakses secara internasional.

Sistem keuangan daerah, seperti untuk melakukan SPJ sudah terhubung secara berjaringan. Sejak Maret 2010 sudah memiliki sistem lelang elektronik melalui www.Pontianak.id. Sistem kependudukan dari Catatan Sipil/Capil juga dikelola secara online. Pemerintah Pontianak akan mengembangkan sistem penerimaan siswa baru untuk SMU yang akan direalisasikan pada akhir tahun 2010. Saat ini juga sedang direncanakan program siaran televisi pendidikan bekerjasama dengan TVRI Pontianak. Semua peralatan sudah siap dan menurut rencana, durasi program ini empat jam siaran setiap hari. Rencananya Kota Pontianak pada awal tahun 2011 akan membangun Pontianak Cyber City, maksudnya di taman-taman atau tempat-tempat umum akan dilengkapi dengan fasilitas wi-fi agar masyarakat bisa memanfaatkannya untuk membuka cakrawala mereka (melek IT) dalam keadaan santai. Saat ini warnet di Pontianak sudah menjamur ada dimana-

mana, juga fasilitas wi-fi ada sampai di warung-warung makan, café, restaurant dll.

Peningkatan pembangunan infrastruktur TIK itu menurut Kasi Postel dan Telematika Dinas Perhubungan, Aries Susiawanto sebagai membangun Pontianak Cyber City. Dengan fasilitas tersebut Pemkot Pontianak terus memberikan pelayanan informasi yang memberdayakan masyarakat miskin dengan akses murah dengan membangun fasilitas internet di tempat-tempat umum. Program ini akan segera dimulai pada tahun 2011 dan sekarang telah dipersiapkan berbagai perangkat pendukungnya.

Sementara itu menurut Susiawanto, pelayanan birokrasi juga sudah berbasis IT meskipun baru untuk sistem keuangan, kependudukan dan penerimaan siswa baru SMU secara on-line. Semakin meningkatnya pelayanan birokrasi berbasis IT itu juga diakui oleh salah seorang tokoh masyarakat, Wayan Nugroho, bahwa saat ini di Pontianak sudah ada website Pontianak yang memungkinkan lelang dilaksanakan secara on-line. Juga sudah ada *e-Government*, *e-education*, dan *e-procurement*, yang semuanya memberikan keleluasaan pada warga masyarakat untuk mengakses informasi.

Pemkot Pontianak juga telah memanfaatkan media televisi dan radio untuk membuka akses informasi secara partisipatif. Menurut Jumarlita, Kabag Humas Provinsi Kalbar, Pemkot selama ini telah menyelenggarakan siaran dialog interaktif melalui TVRI dan RRI sekali dalam satu minggu. Dengan cara itu dimaksudkan agar warga masyarakat aktif dalam proses pengambilan keputusan, paling tidak untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah kota.

Namun Jumarlita mengakui bahwa pemanfaatan internet belum sepenuhnya untuk kepentingan produktif. Di kalangan masyarakat pada umumnya masih cenderung kurang memanfaatkan untuk kepentingan mengakses informasi yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Mereka lebih suka memanfaatkannya untuk keperluan hiburan, seperti game-net, chatting, dan facebook. Memang di kalangan pelajar dan mahasiswa sudah ada yang mengakses informasi akademik, tetapi banyak juga yang menyukai hal-hal yang bersifat rekreatif.

Aspek kultural memang masih menjadi kendala signifikan terhadap upaya menjadikan warga Pontianak lancar dalam memasuki era informasi. Kurangnya motivasi mencari

pengetahuan di kalangan masyarakat, menyebabkan pemanfaatan infrastruktur TIK kurang mengarah pada keperluan produktif. Lemahnya minat baca misalnya, menjadi masalah yang hingga sekarang masih belum mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah. Memang sudah ada perpustakaan keliling, tetapi terkesan kurang mendapat respons antusias dari warga masyarakat. Hanya saja untuk minat baca dalam bentuk kegiatan seperti lomba keterampilan membaca sudah pernah dilakukan. "di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat ada kompetisi membaca", kata seorang mahasiswa Umi Salamah.

Sementara itu dosen Universitas Tanjungpura, A.B. Tandililing mengungkapkan, antusiasme masyarakat Pontianak dalam menyambut kehadiran teknologi informasi perlu diimbangi dengan persiapan mental. Pemerintah perlu mengupayakan agar bagaimana hadirnya teknologi informasi tidak menimbulkan keterkejutan budaya. Oleh karena itu, media literasi atau kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan media untuk kepentingan yang positif dan produktif dapat ditingkatkan. Media literasi adalah kunci bagi percepatan memasuki era masyarakat informasi.

SRAGEN

Sragen merupakan salah satu daerah percontohan di bidang teknologi informasi. Komputersisasi sudah menjangkau sampai ke kedesa-desa (mulai dari pemerintahan kabupaten sampai desa sudah online semua). Sebanyak 208 desa sudah terkoneksi internet, sehingga dalam rangka pelaksanaan operasional pemerintahan desa, pengiriman surat sudah tidak ada lagi kurir semua sudah menggunakan kantor maya.

Sebagian besar masyarakatnya sudah tidak asing dengan internet, bahkan di lingkungan pemda sudah dilengkapi dengan fasilitas *hot spot*. Setiap malam minggu, masyarakat ramai berkumpul di lingkungan pemda dengan membawa laptop, peminatnya kebanyakan generasi muda.

Untuk mengakses internet melalui warnet juga mudah ditemukan, bahkan menjamur di sudut-sudut kota Sragen.

Sejalan dengan pengenalan internet di

masyarakat, beberapa sekolah di kabupaten Sragen menerapkan program pendidikan berbasis Internasional dan juga sekolah dengan program akselerasi/percepatan. Melalui program tersebut siswa sedikit dipaksa untuk lebih mengenai manfaat teknologi, salah satunya adalah memanfaatkan web untuk interaksi tugas belajar dari guru. Selain itu sistem pembelajaran jarak jauh melalui *e-learning* pun sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Menurut Purwandi, Kepala Bidang Kominfo Kab. Sragen, pembangunan infrastruktur ICT di Sragen sudah cukup memadai. Hal ini terbukti di 208 desa, 20 kecamatan dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah terkoneksi jaringan IT dan mempunyai petugas yang khusus menangani IT. Hal senada juga dikatakan oleh Dwi Yanto, Kepala PDE (Pusat Data Elektronik) Kabupaten Sragen, bahwa infrastruktur ICT sudah menjangkau sampai ke daerah perdesaan. Pembangunan infrastruktur *backoffice* berbasis IT dimulai sejak tahun 2002 dan dioperasikan tahun 2007. Hingga sekarang terus dikembangkan, termasuk ke UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pendidikan, Puskesmas, dan bahkan pom bensin, yang semuanya terkoneksi dengan pusat di kantor PDE. Sementara sekolah-sekolah juga telah masuk dalam Jardiknas dan juga terkoneksi dengan PDE.

Pemda Sragen juga sudah memasang *free hotspot* di beberapa titik strategis antaralain, dilingkup depan pemda, pasar, alun-alun, Technopark, GOR, kecamatan kemudian di pendopo. Peminat *free hot spot* cukup banyak, terutama malam minggu. Pemda juga mengadakan kegiatan *saturday sonten/sabtu sore*, dimulai jam 15.00-17.00 WIB sore diadakan pertemuan IT di Technopark dengan masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut pemda memfasilitasi masyarakat umum, terutama anak-anak muda untuk transfer *knowledge*. Salah satu materinya pembahasan penggunaan *opensource*. Menurut Dwi Yanto kegiatan ini rutin dilakukan sedangkan untuk pembicara siapapun bisa menjadi pembicara, Pemda hanya memfasilitasi dan juga menyediakan *free hotspot* untuk bisa langsung dipraktekkan. Mereka juga mempunyai komunitas sendiri, FORTIMAS (Forum TI Masyarakat Sragen).

Untuk program masyarakat miskin agar bisa mengakses internet baru ada di tingkat desa dengan disediakan maksimal 2-3 PC yang terkoneksi internet. Respon masyarakat khususnya dalam pelayanan di BPT (Badan Pelayanan Terpadu) mereka sangat terbantu. Melalui BPT

semua pelayanan sudah terukur dengan menerapkan ISO, selain itu waktu dan biaya jelas terukur dan transparan. Untuk pelayanan di kecamatan juga sudah berbasis IT, seperti untuk pelayanan KTP, KK dan perijinan lainnya di kecamatan. Semua sudah terkoneksi jadi semua pelayanan bisa dilakukan di kantor pemerintahan dimana saja.

Secara teknis apa yang diakses masyarakat melalui *free hotspot* Pemkab Sragen adalah mencari informasi lowongan pekerjaan dan terkoneksi ke situs berjejaring. Untuk game rata-rata di akses melalui warnet.

Pemkab juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, seperti untuk ibu-ibu PKK, para pengrajin kecil mengenai bagaimana menggunakan IT untuk mendukung produk mereka, seperti bagaimana menggunakan IT untuk mencari model, mengiklankan produk mereka. Mereka sangat antusias. Melalui target *cyber regency*, Pemkab Sragen berupaya agar Kabupaten Sragen mampu menerapkan *full IT* untuk pelayanan masyarakat. Sekarang Sragen sedang merambah program ke masyarakat dengan program *e-payment*. "Di 208 desa sudah koneksi internet, nanti kita rencanakan pembayaran rekening listrik, air, telepon bisa dilakukan di desa lewat internet. Karena para prinsipnya sudah ada koneksi hanya tinggal aplikasinya saja. Dengan demikian ini akan mempermudah masyarakat", ungkap Dwi Yanto.

Sragen juga mengembangkan IT melalui *Technopark*. Menurut Sapto, salah seorang staf ICT *Technopark*, *Technopark* merupakan bentuk baru dari pengembangan inovasi di Sragen. Melalui *Technopark* banyak dilaksanakan workshop yang tujuan utamanya adalah pelatihan peserta didik. Sasaran yang ingin dicapai adalah siswa yang lulus SMA dan SMK, juga untuk strata pendidikan lain seperti lulusan S1. Kemudian juga ada pelatihan dari pemerintah dan swasta. Program dari pemerintah dikerjakan disini. Selain menyelenggarakan program workshop dari pemerintah yang berbasis masyarakat disini juga diselenggarakan *workshop* swasta. Saat ini *Technopark* berada di bawah naungan disnaker. Disini memiliki kios 3 in 1 atau *front office technopark*, setiap tamu yang berkunjung ke *Technopark* bisa datang ke kios tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai *workshop* dan lowongan pekerjaan. *Technopark* memiliki beberapa program *workshop* antaralain; bordir, otomotif, ICT, *welding*, dan mekanik. Biaya *workshop* dari pemerintah sejauh ini gratis.

Penutup

Telah menjadi kenyataan bahwa kehadiran TIK di berbagai daerah telah merasuk ke sektor kehidupan. Media massa maupun media online telah cukup intensif dan ekstensif hadir di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah daerah telah terbukti memiliki komitmen tinggi dalam membangun infrastruktur TIK. Bersamaan dengan itu berbagai layanan birokrasi telah berbasis IT, sehingga mampu meningkatkan pelayanan secara lebih efisien.

Akan tetapi, perkembangan infrastruktur TIK masih belum diikuti oleh transformasi kultural warga masyarakat, sehingga pemanfaatan terhadap berbagai fasilitas TIK lebih cenderung untuk keperluan rekreatif. Meskipun di sana-sini harus diakui, bahwa di kalangan sebagian masyarakat mulai tumbuh kesadaran pentingnya merespons kehadiran IT secara positif dan partisipatif. Artinya, mulai terasa munculnya kesadaran untuk memanfaatkan IT bagi upaya menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari.

Hanya saja, terdapat hambatan kultural yang mewujud pada masih rendahnya minat baca dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pengetahuan di kalangan masyarakat. Belum tumbuhnya kesadaran bahwa membaca sebagai perilaku budaya, menyebabkan transformasi menuju masyarakat informasi menjadi tersendat. Untuk itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan di bidang TIK yang orientasinya adalah memberdayakan masyarakat dengan tekanan pada pengembangan sumber daya manusia. Minat baca dan kesadaran pentingnya ilmu pengetahuan harus terus ditingkatkan sebagai prasyarat yang harus dipenuhi agar masyarakat benar-benar siap memasuki era informasi.